



JOURNAL OF Economic Management & Business

The Development of Employee at Malikussaleh University, Lhokseumawe D a h r u m	395
Pengaruh Manfaat Relasional terhadap Keputusan Berbelanja Secara Online pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe H a m d i a h	411
Analisis Kluster Komoditi Karet di Kabupaten Aceh Utara Jullimursyida, Mawardati, Maryudi dan Yulius Dharmas	421
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Khairil Anwar	429
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman (DPKP) Kabupaten Aceh Utara Marbawi Adamy dan Eddy Mulyadi	437
Pengaruh Tingkat Pendapatan Pegawai Negeri Sipil terhadap Permintaan Kredit Konsumtif di Kota Lhokseumawe M a r z u k i	447
Nilai Perusahaan dan Hubungannya dengan Kepemilikan Manajerial, Set Peluang Investasi, dan Dewan Komisaris <i>Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> Muhammad Arfan dan Azimah Dianah	463
Teaching Management for The Lecturers of Economics Faculty of Malikussaleh University, Lhokseumawe Sayni Nasrah	477
Perilaku Konsumen, Keputusan Pembelian, dan Kepuasan Konsumen Y a n i t a	495
Dampak Dana Bergulir BRR NAD-Nias terhadap Pendapatan Penerima Manfaat pada Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Aceh Yeni Irawan	511

E-MABIS

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

JOURNAL OF



Economic
Management
& Business

ISSN : 1412 – 968X

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Dewan Penasehat/Advisory Board

Rektor Universitas Malikussaleh
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Ketua Penyunting/ Chief Editor

Wahyuddin (Chief)

Pengelola Penyunting/Managing Editor

Khairil Anwar (Chief)

Iswadi, Anwar Puteh, Ichsan, Ghazali Syamni,
Damanhur, Naufal Bachri, Husaini, Yulbahri

Penasehat Editorial dan Dewan Redaksi/

Editorial Advisory and Review Board

Prof. A. Hadi Arifin (Unimal), Jullimursyida, Ph.D (Unimal),
Adi Afif Zakaria, Ph.D (UI), Zafri Ananto Husodo, Ph.D (UI),
Fachruzzaman (IJNIB), Erlina, Ph.D (USU), Muhammad Nasir, Ph.D (USK),
Sofyan Syahnur, Ph.D (USK), Tafdil Husni, Ph.D (UNAND),
Jeliteng Pribadi, MA (USK),

Sirkulasi & Secretary :

Kusnandar Zainuddin, Fuadi, Karmila, Ismail

Kantor Penyunting/Editorial Office

Kampus Bukit Indah P.O. Box. 141 Lhokseumawe Telp. (0645) 7014461 Fax. (0645) 56941
E-mail : emabis@fe-unimal.org - Homepage: www.fe-unimal.org/jurnal/emabis

Jurnal E-Mabis Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh diterbitkan sejak tahun 2000 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh nomor SK. No.34/UM.H/KP/2000

Jurnal E-Mabis diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe,
Dekan : Wahyuddin, Pembantu Dekan I : Khairil Anwar, Pembantu Dekan II: Iswadi,
Pembantu Dekan III : Anwar Puteh, Pembantu Dekan IV : Ichsan

Jurnal E-Mabis terbit 4 kali setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
ISSN : 1412-968X. keputusan terbit 4 kali setahun mulai Edisi Vol.13 Nomor: 1, Januari 2012

**PETUNJUK PENULISAN JURNAL EMABIS
FAKULTAS EKONOMI UNIMAL**

1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan harus merupakan tulisan asli dari hasil penelitian, telaah pustaka, laboratorium, pengalaman lapangan atau gagasan yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
 2. Tulisan yang dimuat dalam Majalah Ilmiah E-Mabis berasal dari bidang ilmu-ilmu Ekonomi Manajemen dan Bisnis.
 3. Naskah diketik dengan perangkat lunak pengolahan kata Microsoft Word yang dicetak pada satu permukaan (tidak dibolak-balik) kertas berukuran A-4 putih 80 gram /m², dengan jarak 1,5 spasi (kecuali abstrak), dengan tata letak portraif, serta jarak margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Panjang naskah 15-20 halaman, termasuk halaman dan tabel.
 4. Naskah yang termasuk katagori penelitian, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. **Judul:** diusahakan singkat dan mencerminkan isi penelitian/karya ilmiah, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.
 - b. **Nama Penulis:** ditulis dibawah judul, tanpa gelar kesarjanaan. Jika penulis lebih dari satu orang hendaknya diurutkan dan diberi angka Arab di akhir nama masing-masing penulis. Angka-angka Arab tersebut diberi keterangan sebagai catatan kaki pada halaman pertama, lengkap dengan alamat lembaga penulis
 - c. **Abstrak:** ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik satu spasi dan maksimum 150 kata. Dibawah abstrak dicantumkan kata kunci (key-words) antara 3-5 frasa (phrase)
 - d. **Pendahuluan:** (tanpa subjudul, berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Pustaka)
 - e. **Metode Penelitian** (alat/bahan, cara penelitian, teknik pengambilan data dan teknik analisis)
 - f. **Hasil dan Pembahasan:** menguraikan hasil yang diperoleh, disertai pembahasan baik dalam bentuk tabel, grafik dan gambar
 - g. **Kesimpulan dan Saran**
 - h. **Referensi** (daftar pustaka)
 - i. **Biodata Penulis** (daftar riwayat hidup/curriculum vitae)
 5. Naskah yang termasuk katagori non penelitiari/konseptual, disusun dengan urutan sebagai berikut
 - a. **Judul** (sama dengan poin 4.a)
 - b. **Nama Penulis** (sama dengan poin 4.b)
 - c. **Abstrak** (sama dengan poin 4.c)
 - d. **Pendahuluan** (berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Sedikit Tinjauan Pustaka. Tidak dipecah menjadi anak sub judul, tetapi dalam bentuk alinea saja)
 - e. **Pembahasan** (Isi Informasi/pemikiran ilmiah penulis)
 - f. **Kesimpulan dan Saran** (saran tidak merupakan keharusan)
 - g. **Referensi** (daftar pustaka)
 - h. **Biodata Penulis** (daftar riwayat hidup/curriculum vitae)
 6. Naskah tidak diperkenankan memakai lampiran
 7. Daftar pustaka yang ditampilkan hanya yang benar-benar diacu/dikutip saja: penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang secara kronologis:
 - a. Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit. Judul Buku jilid, edisi, tempat/kota penerbit : nama penerbit
 - b. Untuk karangan/artikel dalam pertemuan ilmiah atau seminar nama pokok dan inisial pengarang, tahun "Judul Karangan". Singkatan nama pertemuan (penyelenggara). Waktu,tempat/kota pertemuan.
 - c. Untuk karangan/artikel dalam majalah atau jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul karangan : nama majalah atau jurnal. Jilid (nomor) halaman permulaan dan akhir.
 - d. Untuk tulisan dari internet : nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul tulisan. Nama jurnal atau majalah/sumberlainnya. (online), vol.,no., (alamat sumber rujukan dan tanggal diakses)
 8. Naskah yang dikirim ke redaksi rangkap 2 (asli dan foto copynya) dan disertakan disketnya selambat-lambatnya 3(tiga) minggu sebelum penertbitan
 9. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah, tanpa merubah isi dan maknanya dengan atau tanpa memberitahukan penulis.
 10. Dewan redaksi dapat menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- Alamat Redaksi :**
Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh,
Kampus Bukit Indah
P.O.Box 141 Lhokseumawe.
Tlp. (0645), 40210 Fax. (0645) 44450.
Email: emabis@fe-unimal.org
Website: fe-unimal.org

Daftar Isi

The Development of Employee at Malikussaleh University, Lhokseumawe D a h r u m	395
Pengaruh Manfaat Relasional terhadap Keputusan Berbelanja Secara Online pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe H a m d i a h	411
Analisis Kluster Komoditi Karet di Kabupaten Aceh Utara Jullimursyida, Mawardati, Muriyudi dan Yulius Dharma	421
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Khairil Anwar	429
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanahan (DPKP) Kabupaten Aceh Utara Marbawi Adamy dan Eddy Mulyadi	437
Pengaruh Tingkat Pendapatan Pegawai Negeri Sipil terhadap Permintaan Kredit Konsumtif di Kota Lhokseumawe M a r z u k i	447
Nilai Perusahaan dan Hubungannya dengan Kepemilikan Manajerial, Set Peluang Investasi, dan Dewan Komisaris <i>Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i> Muhammad Arfan dan Azimah Dianah	463
Teaching Management for The Lecturers of Economics Faculty of Malikussaleh University, Lhokseumawe Sayni Nasrah	477
Perilaku Konsumen, Keputusan Pembelian, dan Kepuasan Konsumen Y a n i t a	495
Dampak Dana Bergulir BRR NAD-Nias terhadap Pendapatan Penerima Manfaat pada Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Aceh Yeni Irawan	511

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

KHAIRIL ANWAR

Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh

Degree of independence of the region is reflected in the region's ability to finance the development of local revenue sources, which in turn will reduce the level of local dependence on central government transfers. This study aimed to determine the effect of Revenue and the General Allocation Fund and simultaneous partial to Revenue Lhokseumawe. The data used in this study is secondary data obtained with this technique with the objective documentation or literature studies Lhokseumawe Government budget period starting from 2002 up to 2010. The results showed that partially Revenue did not significantly affect the Revenue Lhokseumawe. While the General Allocation Fund Revenue significant effect Lhokseumawe. This shows the dependence of the financial terms Lhokseumawe Government to the Central Government is still quite large. Simultaneously Revenue and General Allocation Fund significantly by 99.2% to Revenue Lhokseumawe.

Keywords: total revenue of region, revenue based region, general allocation fund

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan. Upaya pemerintah dalam mencapai prinsip ini salah satunya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah yang bertujuan agar setiap daerah mendapatkan pembangunan yang lebih merata.

Landasan yuridis yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur didalamnya hal-hal yang berkenaan dengan dana perimbangan. Penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pemerintahan memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing daerah yang bersangkutan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Anwar dkk (2008:20). Salah satu unsur penting yang mendanai pembangunan suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terjadi proses pengelolaan serta pengaturan segala asset dan kekayaan yang berada dalam daerah tersebut, tentunya memiliki perbedaan pendapatan antar daerah yang didapatkan dari segala kegiatan perekonomiannya. Dari sudut pandang itulah maka penerimaan PAD dan DAU setiap daerah berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan kegiatan perekonomian dari masing-masing daerah tersebut. Dengan adanya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dan DAU, maka perencanaan ekonomi daerah yang dirumuskan dalam APBD juga akan

lebih dapat difokuskan.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari; pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Pajak hotel dan restoran
 - b. Pajak hiburan
 - c. Pajak reklame
 - d. Pajak penerangan jalan
 - e. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (1) dicantumkan tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak kendaraan bermotor 5%
- b. Pajak balik nama kendaraan bermotor 10%
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%
- d. Pajak hotel dan restoran 10%

- e. Pajak hiburan 35%
- f. Pajak reklame 25%
- g. Pajak penerangan jalan 10%
- h. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- i. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%

Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000, terdapat beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Perusahaan Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai perusahaan daerah dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1962 yakni:

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :
 - a. Memberi jasa
 - b. Menyelenggarakan pemanfaatan umum
 - c. Memupuk pendapatan
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah

hususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

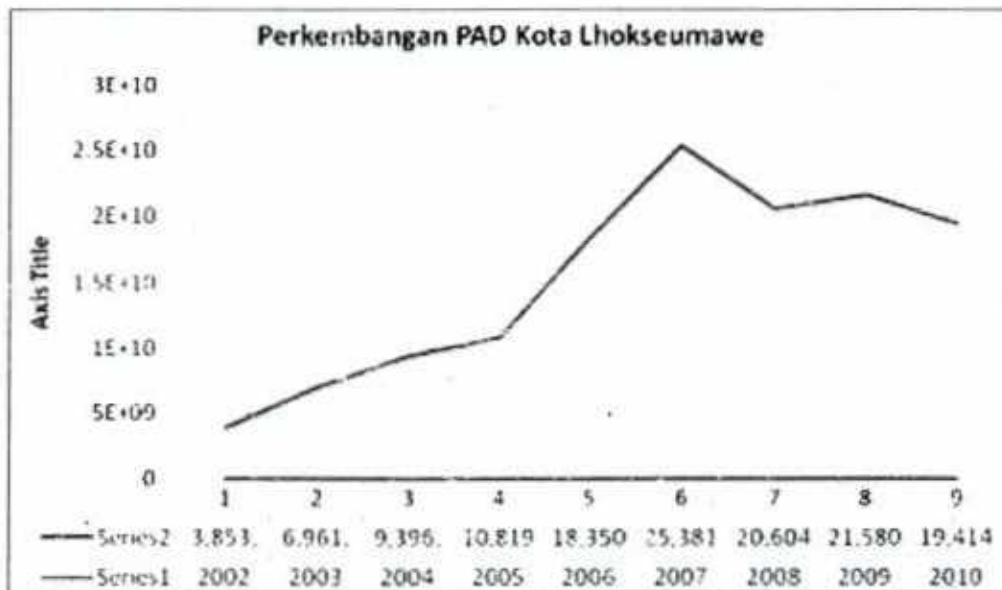
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

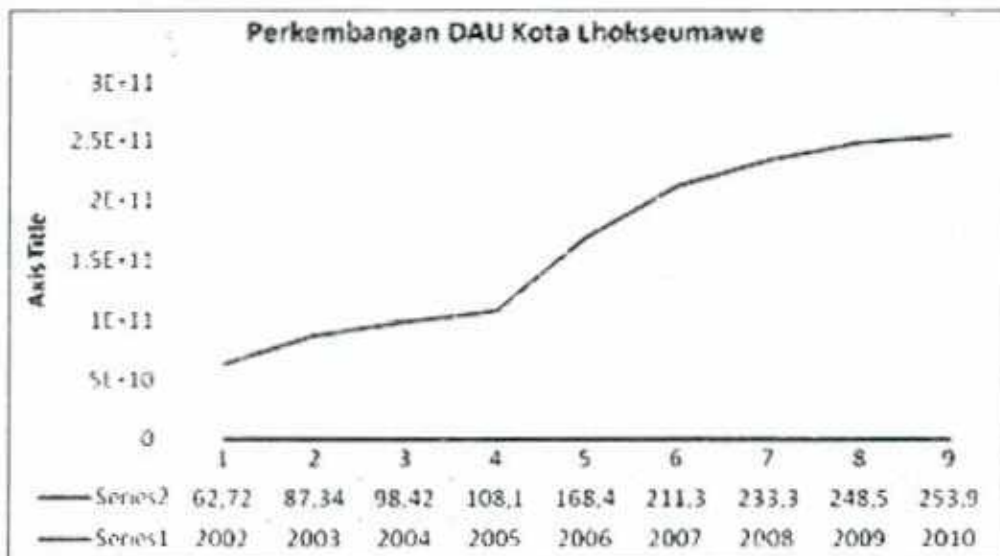
Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PAD Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 terus berfluktuasi mengalami pertumbuhan dan pada beberapa tahun mengalami penurunan dari segi penerimaan pendapatannya, dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda setiap tahunnya. Tetapi pada beberapa tahun terakhir PAD Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari segi penerimaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa penyebab dimana hal tersebut dipengaruhi oleh bagian sumber-sumber penerimaan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah



Gambar 1. Perkembangan PAD Kota Lhokseumawe (2002-2010)



Gambar 2. Perkembangan DAU Kota Lhokseumawe (2002-2010)

Tabel 1
Sumber-sumber Penerimaan PAD Kota Lhokseumawe

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Perusahaan Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2002	3.704.459.291	148.648.763	-	-
2003	6.693.327.612	267.957.470	-	-
2004	6.704.886.326	343.722.855	-	2.348.144.590
2005	7.767.063.191	752.937.020	50.000.000	2.249.856.644
2006	12.423.405.257	1.072.203.465	-	4.854.836.294
2007	14.149.458.908	1.405.616.365	267.14.063	9.569.050.492
2008	13.173.347.226	2.178.729.500	373.496.344	1.256.780.235
2009	12.882.152.930	2.132.928.292	1.782.104.408	4.783.616.342
2010	9.763.844.152	2.519.325.900	2.187.559.394	4.944.264.058

Sumber: DPKAD Kota Lhokseumawe, 2011 (diolah)

dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Gambar 1 memperlihatkan perkembangan PAD Kota Lhokseumawe.

PAD Kota Lhokseumawe pada tahun 2002 sebesar Rp.3.853.108.054. Selanjutnya pada tahun 2003 meningkat 80.67% menjadi Rp.6.961.285.082 untuk tahun 2004 PAD Kota Lhokseumawe tumbuh kembali 34.99% menjadi Rp.9.396.753.771. Kemudian pada tahun 2005 PAD Kota Lhokseumawe naik 15.14% menjadi Rp.10.819.856.855. Di tahun 2006 meningkat signifikan sebesar 69.6% menjadi Rp.18.350.445.016.

Selanjutnya pada tahun 2007 PAD Kota Lhokseumawe sebesar Rp.25.381.279.828 atau meningkat sebesar 38.31%. Pada tahun 2008 PAD Kota Lhokseumawe justru mengalami penurunan sebesar -1.88% menjadi Rp.20.604.686.381. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pajak daerah Kota Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2009 tumbuh kembali sebesar 4.74% menjadi Rp.21.580.801.973,00 dan pada tahun 2010 PAD Kota Lhokseumawe menurun kembali sebesar -10.04% menjadi Rp.19.414.993.504,00 yang disebabkan menurunnya penerimaan dari pajak daerah Kota Lhokseumawe.

Berbeda dengan PAD, DAU Kota Lhokseumawe setiap tahunnya justru terus mengalami peningkatan walaupun persentase peningkatan DAU relatif kecil.

Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe dari segi DAU dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2002 DAU Kota Lhokseumawe berjumlah Rp.62.720.000.000. Pada tahun 2003 sebesar Rp.87.340.000.000

dengan pertumbuhan sebesar 39.25%, kemudian meningkat 12.69% menjadi Rp.98.420.000.000 pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya tumbuh 9.9% menjadi Rp.108.124.000.000. Tahun 2006 DAU Kota Lhokseumawe meningkat 55.81% menjadi Rp.168.470.000.000. Pada tahun 2007 tumbuh kembali sebesar 25.43% menjadi Rp.211.310.000.000 dan tumbuh 10.41% menjadi Rp.233.315.427.000 pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2009 DAU Kota Lhokseumawe tumbuh kembali sebesar 6.52% mejadi Rp.248.522.186.000 dan pada tahun 2010 sebesar Rp.253.964.760.000 hanya tumbuh sebesar 2.2% dari tahun 2009.

Pertumbuhan PAD dan DAU yang terjadi di Kota Lhokseumawe turut memberikan kontribusi bagi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, sehingga memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan kegiatan pembangunan di Kota tersebut. Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber utama Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari hasil uji statistic dengan menggunakan model regresi linier berganda sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Estimasi Model Penelitian

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13397349789.704	10191474331.246	-0.898466	0.3775
PAD	2.308322	1.493202	1.594434	0.1234
DAU	1.363202	0.148202	0.999105	0.3273
Effects Specification				
R-squared	0.995706	Mean dependent var		4489787.
Adjusted R-squared	0.992388	S.D. dependent var		8994981.
S.E. of regression	6.632001	Akaike info criterion		34.49918
Sum squared resid	1.10E+15	Schwarz criterion		34.98303
Log likelihood	-52.98152	F-statistic		381.2491
Durbin-Watson stat	2.779432	Prob(F-statistic)		0.000297

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini ditunjukkan oleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $381.249 > 5.1433$. Hasil pengolahan data juga memperlihatkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.996 yang dapat diartikan bahwa hubungan variabel terikat (Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe) dengan variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) adalah sangat kuat yaitu sebesar 99.6%.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.992 dapat diartikan bahwa Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 99.2% dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sedangkan sisanya hanya sebesar 0.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 35 dan data yang digunakan adalah dari tahun 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan penulis konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah di Jawa Tengah sedangkan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe dikarenakan penulis menelaah bahwa APBD yang ditetapkan di Aceh adalah wujud dari anggaran defisit dimana semua penerimaan akan habis digunakan untuk pengeluaran atau belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

Hasil regresi terhadap Pendapatan Asli Daerah (X_1) diperoleh nilai koefisien regresi dari X_1 sebesar 2.308. Hubungan yang ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe adalah hubungan yang positif. Dimana, jika angka PAD meningkat Rp.1.000 maka Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe akan meningkat Rp.2.308. Dalam penelitian ini dapat disebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.

Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t diperoleh hasil bahwa, Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe, hal ini didukung oleh nilai t_{hitung} yang lebih kecil daripada t_{tabel} yakni dengan t_{hitung} 1.546 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.8412. Hal tersebut juga didukung oleh nilai *significance* PAD sebesar 0.173 jauh diatas 0.05, maka variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009), yang mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung di Provinsi Riau. Setiawan (2010) yang melakukan penelitian di Jawa Tengah juga menemukan hasil bahwa PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah. Maulana (2012) menemukan adanya perbedaan dalam besaran pengaruh PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat. Komposisi PAD yang besar sebagai sumber pembelanjaan pemerintah daerah yang paling besar dijumpai di Jawa Barat, diikuti oleh DIY dan yang paling rendah dijumpai di Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

Hasil regresi terhadap Dana Alokasi Umum (X_2) diperoleh nilai koefisien regresi 1.363. Hubungan yang ditunjukkan oleh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe adalah hubungan yang positif. Dimana, jika angka DAU meningkat Rp.1.000, maka Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar Rp.1.363.

Dalam penelitian ini DAU menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 9.204 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.8412. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi jauh dibawah $\alpha=0.05$, maka variabel DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2007) Dengan hasil penelitian DAU secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap prediksi belanja daerah di Indonesia, sehingga dapat dikatakan terjadinya *flypaper effect* yang dapat diartikan bahwa penerimaan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah lebih besar daripada penerimaan dari dalam daerah tersebut. Penelitian Frelistiyani dan Abdul Rohman (2011) juga menemukan adanya pengaruh positif DAU dengan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Penelitian Setiawan (2010) menemukan bahwa besarnya transfer pemerintah melalui DAU berdampak signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maulana (2012) yang melakukan pengujian pada tiga Provinsi sekaligus yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat menemukan bahwa DAU berpengaruh nyata terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.

REKOMENDASI

1. Dengan menggunakan variabel yang sama, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada semua kabupaten atau kota. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan dari peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak hanya merupakan sebagian kabupaten/kota saja.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang mempunyai rentang waktu yang lebih dari sembilan tahun, sehingga hasil dari analisa lebih mampu menjelaskan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
3. Bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe agar dapat lebih memaksimalkan dalam mencari peluang atas sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Lhokseumawe sehingga dapat meningkatkan kemandirian Pemerintah Kota dan dapat memperkecil tingkat ketergantungan keuangan daerah dari Pemerintah Pusat.

REFERENSI

- Anwar, dkk. (2008). Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe. *Jurnal E-Mabis*, FE Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.
- Frelistiyani, Winda Dan Rohman, Abdul (2011) *Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Pada Tahun 2006-2008)*. Thesis. Undip. Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/26380/>
- Maulana, Anton (2012) *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Jawa Tengah, DIY, Dan Jawa Barat)*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://etd.eprints.ums.ac.id/18027/>
- Maulida, Novi Pratiwi. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di indonesia). Yogyakarta.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah. Semarang.
- Setiawan, Anjar. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. <http://eprints.undip.ac.id/26469/1/Skripsi%28R%29.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 (2004) tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*